

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- . 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Arend Lijhart. 1992. *Parlemetary versus Presidensil Government*. Oxford University Press. London.
- Ateng Syafrudin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta. Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Perkembangan UUD 1945*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Cambridge International Dictionary of English. 1995. Cambridge University Press. New York.
- Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan. 2012. *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Perkumpulan Untuk Demokrasi dan Pemilu. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. CV Rajawali. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Jakarta.
- Fritz Edward Siregar. 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Harold Laswell. 1936 *Politics: Who Gets What, When, How*. Whittlesey House. New York.
- Henry B. Mayo. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press. New York
- Henry Campbell Black. 1968. *Black's Law Dictionary-Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence*,

Ancient and Modern (Revised Fourth Edition), West Publishing Co. Saint Paul Minnesota.

-----, 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. Saint Paul Minn.

Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan. Jakarta.

-----, 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan. Jakarta.

Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. PT Alumni. Bandung.

Jay A Sigler. 1977. *The Legal Sources of Public Policy*. Lexington Books. Lexington.

Jeremy Bentham. 1979. *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Nuansa Cendikia. Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.

Lamintang. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Leden Marpuang. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta.

Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Setara Press. Malang.

Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing. Malang.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*. Pradya Paramitha. Jakarta.

Miriam Budiarto. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Nandang Alamsah Deliarnoor. 2017. *Hukum Pemerintahan*. UNPAD Press. Bandung.
- Ni'matul Huda. 2014. *Ilmu Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Paulus Effendie Lotulung. 1986. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- , 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. 2013 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- R.M. MacIver. 1950. *The Modern State*. Oxford University Press. London.
- Ramlan Subakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. 2001. *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Serial Demokrasi Elektoral*. Kemitraan Bagi Pembaruan tata Pemerintahan. Jakarta.
- Ratna Dewi Petalolo. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta.

- , 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Robert M. MacIver. 1947 *The Web of Government*. The MacMillan Company. New York.
- Romi Librayanto. 2009. *Ilmu Negara, Suatu Pengantar*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- S.I. Benn and R.S. Peters. 1964. *Principles of Political Thought*. Collier Books. New York.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsipnya dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- South-East Asian and Pasific Conference of Jurist, 1965. *The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*. International Commission of Jurist. Bangkok.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika. Jakarta.
- W.A. Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wasis Susetyo. 2016. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Wiwin Suwanndii dan Fajlurrahham Jurdi. 2017. *Menteri Negara dalam Sistem Presidensial*. Litera. Yogyakarta.

Jurnal:

Anis Ibrahim, "Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa", Jurnal Hukum "Argumentum" Vol.8 No. 2, Juni 2009.

Ateng Syafruddin. Bandung. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan. 2000.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020*, Bagian TLP Biro TP3 Bawaslu Republik Indonesia, 7 Februari 2021

Eko Sabar Prihatin, "Politik Hukum Otonomi Daerah tentang Pemilukada", Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 43, Nomor 1 Januari 2014.

I Gusti Ngurah Agung Sayog Raditya, "Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) Dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum Yang Ddemokratis Di Indonesia" Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013.

Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri. "Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum". Justitia Et Pax: Jurnal Hukum, Vol. 35. Nomor 2 Desember 2019.

Refly Harun, *Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Tim Peneliti Perludem. Jakarta. *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*. 2006.

Internet:

<http://dkpp.go.id/.index.php?a=detilberita&id=1730>

<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/recommendation>

<http://www.dkpp.go.id/index.ph-p?a=detilberita&id=1754>

<https://news.detik.com/berita/d-5211836/pencalonan-dibatalkan-kpu-kubu-bupati-ogan-ilir-aju-kan-gugatan-ke-ma>

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu>

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu>

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/24/22503611/dinyatakan-tak-memenuhi-syarat-calon-petahana-di-pilkada-banggai-berencana?page=all>

<https://gemasulawesi.com/pilkada-banggai-2020/>

<https://regional.kompas.com/read/2020/11/07/17030211/gugatan-dikabulkan-ma-paslon-petah-ana-ilyas-endang-kembali-jadi-peserta>

Makalah atau Esai Ilmiah:

Rusadi Kantaprawira. 1998. *Makalah: Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Tersruktur, Sistematis dan Massif.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2007.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2007.